

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penjelasan berkaitan dengan penelitian ini adalah adanya bentuk tanggung jawab manajemen kepada investor sebagai pihak yang berkepentingan terhadap kinerja usaha. Pengertian ini kali dikembangkan oleh (Jensen & William, 1976) . Istilah terhadap majemen dan pemilik modal dalam teori *Agency* yang pertama istilah untuk manajemen (*Agen*) dan pemilik modal (*Prinscipal*). Teori keagenan mendukung adanya kepentingan *Principal* yang berbeda beda sehingga menuntut *Agen* untuk menyesuaikan penyediaan informasi bagi *Principal*.

Manajemen perusahaan membutuhkan tenaga-tenaga profesional untuk menjalani perusahaannya. Tenaga profesional juga bekerja untuk kepentingan pihak pemegang saham perusahaan atau bisa disebut juga sebagai *Agen* dari *Principal*. Adanya tenaga profesional yang membantu manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan *profit* perusahaan yang akan memperoleh keuntungan bagi semua pihak perseroan, peningkatan *profit* yang di hasilkan oleh *Agen* tingkat imbalan atau manfaat yang akan diterima oleh *Agen*. pada siklus ini investor memiliki fungsi tugas untuk memonitor dan memperhatikan tingkat kegiatan usaha, dan memastikan inisiatif manajemen bagi kepentingan pengembangan perusahaan.

Adanya tanggung jawab manajemen terhadap pemilik saham perusahaan membutuhkan jasa independen auditor sebagai pihak penengah antara kepentingan pihak manajemen dan pemilik saham. Sering terjadi pada perusahaan-perusahaan besar atau entitas komersial. Pada umumnya manajemen atau lebih dikenal sebagai direksi akan berusaha memaksimalkan nilai Perusahaan namun pada kenyataan yang ada upaya tersebut sering kali tidak terpenuhi akibat adanya kepentingan yang lainnya bagi seorang direksi sehingga pada saat ini akan muncul sebuah *problem* atau

masalah yang di disebut sebagai *Agency Problem* akibat adanya perbedaan informasi perusahaan. Sehingga untuk menetralsir *problem* yang akan berpotensi tersebut dibutuhkan pihak penengah atau pihak independen yang dapat mengatasi semua masalah-masalah penyimpanan informasi pada perusahaan yang disebut sebagai independen auditor.

2.1.2. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Secara harafiah, kata "*good*" berarti "baik", "*corporate*" berarti "perusahaan", dan "*governance*" berarti "tata kelola". GCG dapat didefinisikan sebagai prosedur atau standar untuk penilaian susunan olah perseroan yang baik berdasarkan metrik perusahaan seperti kejelasan informasi, transparansi, manajemen, dan faktor lain yang memengaruhi bisnis.

Dalam susunan olah yang dinilai bagus, transparansi diperlukan untuk memberikan informasi untuk sipemakai informasi perusahaan. Semua informasi material tentang perusahaan harus dilaporkan dan diberikan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Kepentingan pemangku kepentingan mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan tahunan tentang aktivitas, kinerja, dan hasilnya. Laporan tahunan ini dapat digunakan sebagai pedoman atau alat untuk membuat keputusan.

Menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), GCG adalah sistem yang mengatur bagaimana manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab merupakan inti dari GCG. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- Transparansi, informasi yang relevan harus disampaikan dengan jelas kepada pemangku kepentingan.
- Akuntabilitas, setiap individu dan organ dalam perusahaan mampu memberikan pembelaan yang disadari oleh nurani dan tindakan mereka.
- Tanggung Jawab, perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial dan etika orang yang mengingkan informasi usaha.

- Kemandirian, struktur organisasi harus mendukung pengambilan keputusan yang bebas dari pengaruh eksternal.
- Keseimbangan kepentingan, semua kepentingan pemangku kepentingan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

2.1.3. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Catatan usah berkelanjutan merupakan sebuah buku tambahan yang di buat perseroan untuk mengungkapkan, mengukur, dan memperlihatkan aktivitas perusahaan kepada pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan. Laporan keberlanjutan biasanya bersifat *nonfinancial* dan dijadikan sebagai bahan acuan untuk melihat perkembangan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan (Amelia P. H., 2023). Laporan keberlanjutan bentuk transparansi perusahaan terhadap lingkungan sosial, masyarakat, dan ekonomi yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat publik. Lebih lengkapnya laporan keberlanjutan berisi semua informasi aktivitas perusahaan setiap tahunnya.

Pengungkapan laporan keberlanjutan harus memenuhi standar laporan tahunan GRI (*Global Reporting Initiative*), yang terdiri dari indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial. Standar GRI terdiri dari 77 indikator pengungkapan, terdiri dari 13 bagian ekonomi, 30 bagian lingkungan, dan 34 bagian sosial. Selain itu, standar GRI G4 yang lebih komprehensif juga digunakan untuk pengungkapan laporan keberlanjutan (Susadi & Kholmi, 2021). Masing-masing dari standar pengungkapan laporan keberlanjutan ini memiliki kelemahan dan keuntungan yang berbeda.

2.1.4. Komite Audit

ikatan antara anggota komite audit di Indonesia (IKAI Group, 2024). Komite audit biasanya dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab untuk membantu dewan komisaris mengawasi sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas operasi audit internal. Komite audit biasanya terdiri dari tiga atau lebih orang dan bertanggung jawab untuk menilai hasil

pengendalian internal perusahaan, menilai laporan keuangan perusahaan, dan membantu mencapai tujuan operasi audit internal.

2.1.5. Dewan Komisaris Independen

Menurut Pasal 120 ayat (1) UU PT, komisaris independen diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, atau RUPS, dan tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris lainnya. Di sisi lain, Pasal 120 ayat (2) UU PT menetapkan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan atau nasihat kepada direksi atau manajemen perusahaan (Hans & Associates, 2023).

2.1.6. Dewan Direksi

Pemegang saham menunjuk dewan direksi untuk mengelola perusahaan demi kepentingan perusahaan dan selaras dengan anggaran dasar serta tujuan perusahaan. Dalam organisasi perusahaan publik di Indonesia, dewan direksi dibentuk dalam rapat umum pemegang saham, dan merupakan posisi ketiga tertinggi setelah dewan komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan direktur utama berada di puncak dewan direksi (Sutedja, 2024). Tujuan pembentukan dewan direksi adalah untuk bertindak sebagai agen dari pemegang saham perusahaan dalam menjalankan kepengurusan perusahaan.

2.1.7. Kepemilikan Manajerial

Dengan kepemilikan yang dipegang oleh pihak manajerial, anggota dewan direksi dan komisaris memiliki bagian dari perusahaan. Selain menjalankan fungsi manajerial, komisaris dan dewan direksi juga memiliki saham dalam perusahaan. Situasi ini dapat memotivasi manajemen untuk memperbaiki kinerja perusahaan serta mengurangi ketegangan antara manajemen dan pemegang saham (Gunawan & Wijaya, 2020). Selain menjadi pihak yang bertanggung jawab atas bagaimana bisnis berjalan, pemegang manajemen juga merupakan pihak yang menerima keuntungan. Dewan direksi dan dewan komisaris adalah pihak yang dimaksud. Mereka bertindak sebagai agen pemilik perusahaan dan memiliki hak atas keuntungan perusahaan.

2.1.8. Kepemilikan Institusional

Saham yang dimiliki oleh lembaga yang beroperasi seperti bank, perusahaan asuransi, institusi investasi, reksa dana, sekuritas, dana pensiun, serta institusi keuangan dan entitas lainnya. Salah satu cara untuk mengurangi konflik agensi adalah kepemilikan institusional. Dengan memiliki jumlah kepemilikan institusional yang besar, pemilik dapat mendorong manajemen untuk menggunakan prinsip akuntansi konservatif untuk mencegah tindakan *oportunis* manajemen mengganggu kinerja perusahaan (Jdih Group, 2022).

2.1.9. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan perorangan ataupun kelompok dari luar Indonesia yang menanamkan modalnya baik dalam bentuk saham maupun mendirikan perusahaan di Indonesia oleh Taduga dan Nofal (2019) di dalam (Amelia & Wardoyo, 2025). Sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan komunitas, perusahaan yang memiliki proporsi modal asing yang lebih tinggi cenderung lebih fokus pada transparansi mengenai tanggung jawab sosial mereka untuk mempertahankan kepercayaan dari pihak eksternal terkait investasi dalam negeri.

Pemerintah telah menetapkan PP 31/2022 membahas topik penting seperti jenis perusahaan efek dan berapa banyak saham yang dapat dimiliki badan hukum asing dalam perusahaan efek patungan (Jdih Group, 2022). Perusahaan efek dapat berupa satu dari dua jenis:

1. Badan sekuritas nasional, di mana mayoritas kepemilikan saham ada pada orang perorangan atau entitas hukum dari Indonesia, atau
2. Perusahaan sekuritas bersama, di mana mayoritas kepemilikan saham dimiliki oleh individu atau entitas hukum dari Indonesia, atau lembaga hukum asing yang beroperasi dalam sektor keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Oktapiani & Simatupang, 2024)	Pengaruh Efektivitas Manajemen Perusahaan dan Besaran Perusahaan terhadap Penyajian Laporan Ketahanan di Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Tahun 2020 hingga 2022.	1. Faktor-faktor seperti komite audit dan skala perusahaan berpengaruh terhadap penerbitan laporan keberlanjutan. 2. Struktur dewan komisaris yang tidak terikat dan kepemilikan oleh institusi tampaknya tidak berpengaruh terhadap hasil laporan keberlanjutan.
2.	(Febriawaningsih & dkk, 2024)	Studi Kasus dalam Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2018-2021: Dampak Leverage, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Pengungkapan Ketahanan: Laporan Kasus.	1. <i>Leverage</i> memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. 2. <i>Governance</i> perusahaan yang baik memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. 3. Sistem pengendalian manajemen memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan.
3.	(Rahmawati & Rohma, 2024)	Dampak Pengelolaan Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga terhadap Kinerja Berkelanjutan.	1. Kepemilikan oleh keluarga tidak memberikan dampak terhadap kinerja yang berkelanjutan. 2. Komposisi kepemilikan keluarga berperan tidak signifikan dalam kinerja berkelanjutan untuk menekan biaya pengungkapan. 3. Kualitas tata kelola sangat berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan.
4.	(Suhardjo & dkk, 2024)	Peran Hilirisasi dan Sertifikasi sebagai Variabel Moderasi: Dampak Latar Belakang Pendidikan Direksi dan	1. Latar belakang pendidikan direksi dapat berdampak besar pada kebijakan pengungkapan keberlanjutan perusahaan. 2. Hilirisasi tidak memiliki

		Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Keberlanjutan pada Perusahaan Pertanian di Indonesia.	pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana variabel dimoderasi. 3. Sertifikasi yang berhubungan dengan keberlanjutan atau sertifikasi lain dapat mengurangi keterkaitan antara pendidikan anggota dewan dan pengungkapan tentang keberlanjutan.
5.	(Dewi & dkk, 2024)	Dampak dari Penerapan Sistem Manajemen yang Efisien Terhadap Transparansi Laporan Kinerja Ketahanan di Perusahaan Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Kinerja finansial berdampak pada keterbukaan laporan keberlanjutan; struktur dewan direksi tidak berpengaruh pada keterbukaan laporan keberlanjutan; komite audit berdampak pada keterbukaan laporan keberlanjutan; dan dewan komisaris independen juga berpengaruh pada keterbukaan laporan keberlanjutan secara bersamaan.
6.	(Amelia P. H., 2023)	Uji Coba Studi Konseptual mengenai Dampak Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Efektif terhadap Pemberian Laporan Keberlanjutan	Penyampaian laporan berkelanjutan tidak terpengaruh oleh ukuran dewan komisaris, komite audit, ataupun perusahaan itu sendiri.
7.	(Marcodinita & dkk, 2023)	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Manajemen Bisnis yang Baik terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko.	1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan komite audit dalam manajemen risiko memberikan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan manajemen risiko. 2. Aspek-aspek seperti kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan publik, komisaris yang independen, dan komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.
8.	(Rachmadanty & Agustina, 2023)	Laporan keberlanjutan terpengaruh oleh besarnya ukuran Direksi,	1. Pengumuman Laporan Keberlanjutan tidak dipengaruhi oleh besarnya dewan direksi,

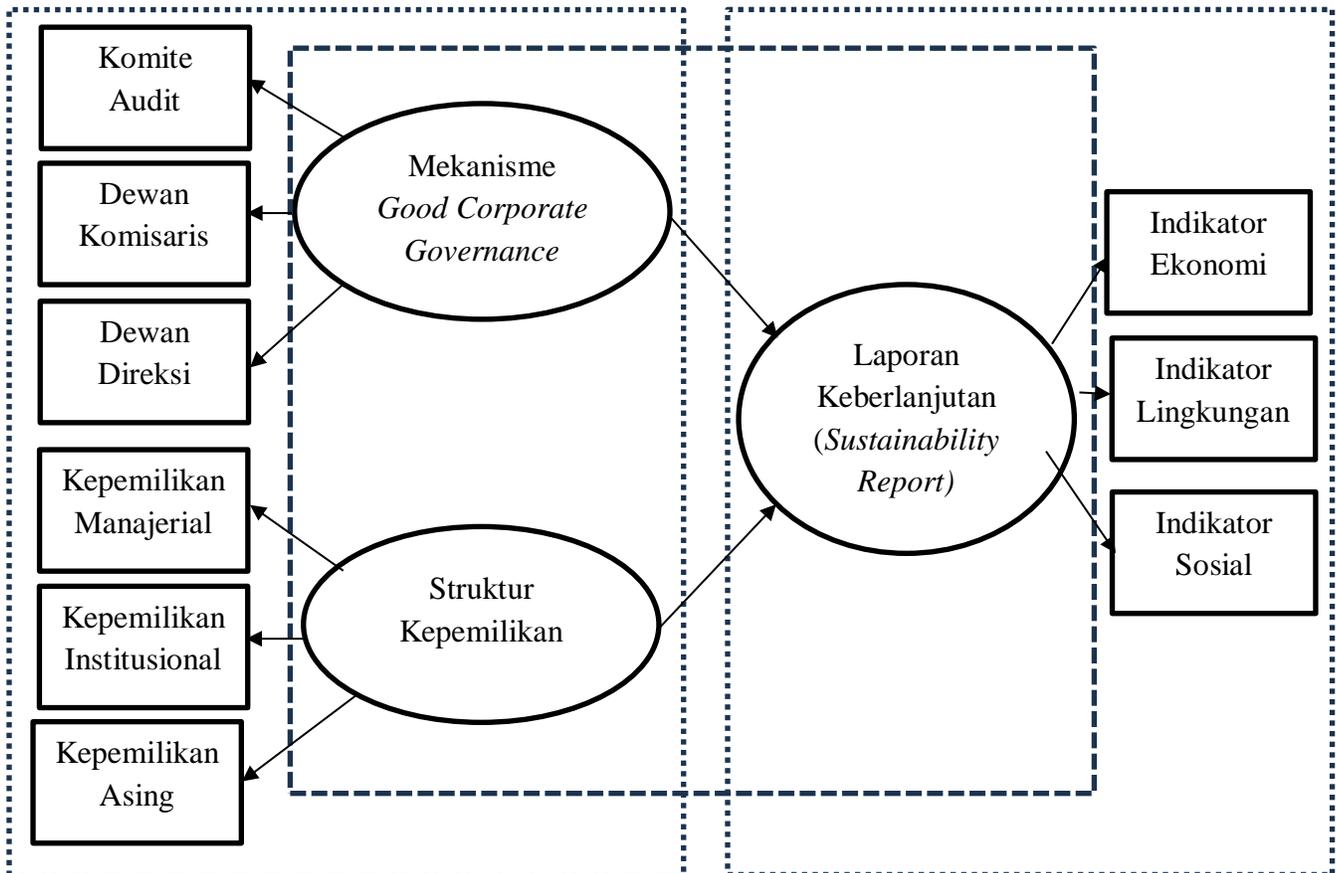
		Dewan Komisaris Independen, kepemimpinan ganda, kategori perusahaan, struktur komite keberlanjutan, aktivitas yang dilakukan perusahaan, kepemimpinan yang bersifat internasional, serta bentuk kepemilikan yang ada.	keberadaan dewan komisaris independen, adanya kepemimpinan ganda, tipe perusahaan, Komite Keberlanjutan, kegiatan perusahaan, ataupun kepemilikan asing. 2. Konfigurasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengumuman Laporan Keberlanjutan.
9.	(Pangastuti & Achyani, 2023)	<i>Sustainability Reporting Disclosure</i> dipengaruhi oleh manajemen manusia, kinerja keuangan, manajemen perusahaan yang baik, dan penggunaan teknologi informasi.	1. Kualitas pemerintahan manusia yang rendah tidak berdampak pada Laporan Ketahanan. 2. Kinerja keuangan tidak berdampak pada Laporan Ketahanan. 3. Jumlah dewan komisaris independen yang rendah tidak berdampak pada Laporan Ketahanan. 4. Pengungkapan kepemilikan manajemen tidak berdampak pada Laporan Ketahanan Lingkungan. 5. Isu Penggunaan IT tidak berdampak pada Laporan Ketahanan Lingkungan.
10.	(Putri & Haryati, 2023)	Perusahaan sedang menjalani evaluasi terhadap manajemen yang berkualitas dan aspek transparansi mengenai tanggung jawab sosial mereka.	Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang terkait dengan komite audit dan kepemilikan manajerial. Di samping itu, faktor-faktor seperti komisaris independen, dewan direksi, tingkat profitabilitas, dan rasio utang juga tidak memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
11.	(Salsabila & dkk, 2022)	Melihat Efek Mekanisme Manajemen Perusahaan yang Baik terhadap	1. Keahlian komite audit memengaruhi pengungkapan CSR secara signifikan;

		Pengungkapan Kewajiban Sosial Perusahaan pada Perusahaan BUMN.	2. Kepemilikan manajemen dan proporsi saham pemerintah memengaruhi pengungkapan CSR; dan 3. Ukuran dan komposisi dewan komisaris yang independen tidak berdampak pada seberapa banyak pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan.
12.	(Ardiani & dkk, 2022)	Melihat Bagaimana Mekanisme Manajemen Keuangan yang Baik Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Ketahanan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Penyampaian Laporan Kinerja Berkelanjutan mendapatkan dampak positif dari penerapan <i>Good Corporate Governance</i> oleh komite audit; namun, keberadaan komisi independen, kepemilikan oleh manajer, serta dewan direksi yang mencakup representasi perempuan tidak memberikan dampak pada penyampaian Laporan Kinerja Berkelanjutan.
13.	(Susadi & Kholmi, 2021))	Melihat Efek Mekanisme Manajemen dan Struktur Kepemilikan yang Baik pada Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.	Hasil positif yang menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang baik dan tata kelola perusahaan memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan.
14.	(Damayanti & Hardiningsih, 2021)	Determinan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan. Tahun 2021.	1. Faktor <i>Profitabilitas</i> tidak memberikan dampak pada pengungkapan laporan keberlanjutan. 2. Faktor <i>Leverage</i> tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. 3. Faktor ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif atau berlawanan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. 4. Faktor <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh pada pengungkapan laporan keberlanjutan.
15.	(Gunawan B. , 2020)	Dampak dari cara perusahaan dikelola dan pembagian kepemilikan publik terhadap	1. Komisaris yang independen memiliki dampak buruk terhadap pengelolaan risiko di sektor manufaktur Indonesia, tetapi

		<p>pengungkapan risiko manajemen perusahaan.</p>	<p>dampaknya positif untuk pengelolaan risiko di sektor manufaktur Malaysia.</p> <p>2. Jumlah anggota dalam dewan komisaris memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan risiko di sektor manufaktur Malaysia.</p> <p>3. Reputasi dari auditor membawa efek positif pada pengelolaan risiko di perusahaan manufaktur Indonesia, sementara memberikan dampak negatif di perusahaan manufaktur Malaysia.</p> <p>4. Besar perusahaan berpengaruh buruk terhadap manajemen risiko harga baik di Indonesia maupun di Malaysia.</p> <p>5. Struktur kepemilikan publik berdampak baik bagi manajemen risiko harga di kedua negara, Indonesia dan Malaysia.</p>
--	--	--	---

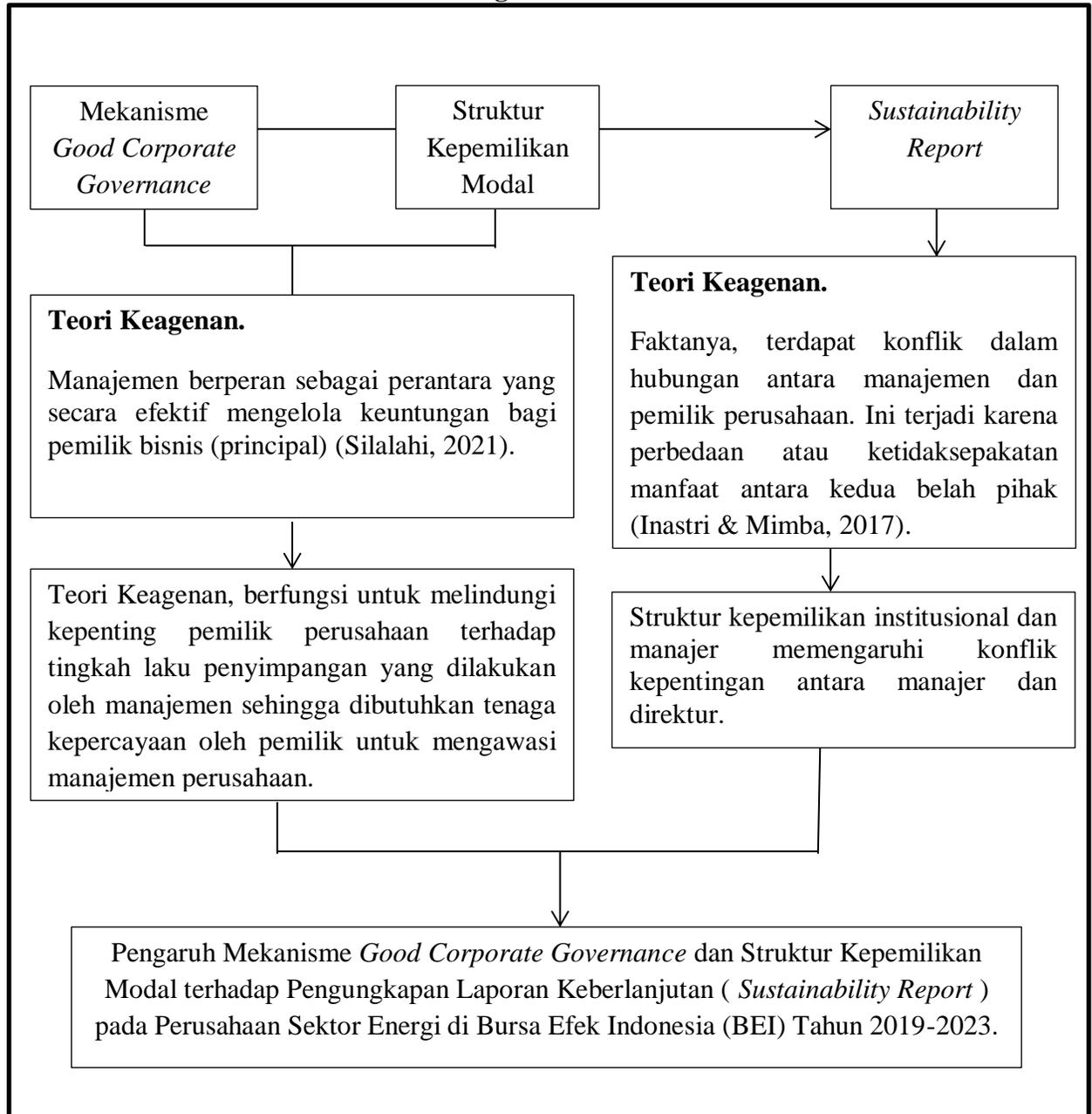
2.3. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.5. Pengembangan Hipotesis

Pengembangan gagasan untuk penelitian ini dapat dirangkum dalam bentuk berikut:

1. Hipotesis 1 (H1): Pengaruh Komite Audit terhadap penyampaian laporan keberlanjutan.
2. Hipotesis 2 (H2): Pengaruh Dewan Komisaris terhadap penyampaian laporan keberlanjutan.
3. Hipotesis 3 (H3): Pengaruh Dewan Direksi terhadap penyampaian laporan keberlanjutan.
4. Hipotesis 4 (H4): Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap penyampaian laporan keberlanjutan.
5. Hipotesis 5 (H5): Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penyampaian laporan keberlanjutan.
6. Hipotesis 6 (H6): Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap penyampaian laporan keberlanjutan.